

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pelayanan publik pada sebuah daerah menjadi perhatian bersama, peningkatan kualitas pelayanan untuk publik penting dijalankan pemerintah untuk terselenggaranya kepuasan kerja pada masyarakat. Tujuan pokok sektor publik yakni pemberian pelayanan publik bukan guna mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun hingga sekarang kita belum mengerti bagaimana sebenarnya pelayanan yang hendak didapat rakyat selaku warga negara serta seperti apa idealnya pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. anggaran diperlukan dalam pengendalian sumber daya tersebut baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Ketika organisasi semakin berkembang, pengangguran menjadi langkah penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sistem akuntansi.

Desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas juga memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, keputusan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi suatu fenomena global termasuk diindonesia, sehingga menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan negara. Pemberlakuan undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dan hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah .Ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.sebagai konsekuensi dari kewenangan otonom yang luas,pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan suatu daerah.

Anggaran merupakan rencana formal dalam bentuk kuantitatif untuk mengoordinasikan dan mengimplementasikan rencana dimasa depan sebagai alat kontrol, anggaran disusun berdasarkan pelaksanaan aktual sebelumnya. Namun untuk mencapai fungsi perencanaan, penyusunan anggaran diperluas dengan memasukan pertimbangan (asumsi-asumsi) perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dimasa depan termasuk asumsi target-target improvisasi proses yang diharapkan.

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik,termasuk diantaranya pemerintah daerah. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Pada sektor

swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan untuk mendapat masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dari uang publik. Penganggaran merupakan tingkat yang lebih tinggi dari pengembangan dan memungkinkan fokus pada hasil jangka panjang, penggunaan efektif sumber daya dan keputusan yang tepat waktu (Maddocks 2011). Penganggaran membantu pemerintah yang efektif dan kinerja keuangan, memungkinkan pemerintah untuk membandingkan semua biaya yang direncanakan dan pendapatan antisipasi untuk periode berbagai persoalan masih sulit diselesaikan hal ini mengingat proses tersebut sangat luas dengan melibatkan banyak sumberdaya, dipengaruhi juga oleh faktor internal dan eksternal, serta ketidakpastian ekonomi dan politik (pangau dan retnani, 2013).

Penggunaan anggaran adalah istilah yang digunakan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah indonesia yang merujuk kepada pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada dikementrian, lembaga, bagian dari satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi pengguna anggaran (mathews, 1997). Anggaran (budget) merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dan direncanakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang tetapi dapat juga dinyatakan dalam

satuan barang (Julita 2012).

Aspek sumber daya manusia sebagai penyusun dan pelaksana anggaran haruslah dipertimbangkan karena anggaran akan dipengaruhi oleh perilaku manusia terutama bagi pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, apabila dalam penyusunan anggaran tidak memperhatikan salah satu pihak, atau komunikasi antar bawahan dan atasan kurang berjalan dengan baik, maka kemungkinan bisa mengakibatkan sistem anggaran gagal dikarenakan adanya pihak yang kurang puas dengan anggaran yang telah disusun (Alfebrianto, 2013).

Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam membantu aparatur pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran –sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran-sasaran anggaran yang tidak jelas atau membingungkan akan mengakibatkan ketidakpastian kepada para pelaksananya sehingga berimplikasi pada menurunnya suatu kinerja yang berarti juga menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat para pelaksana anggaran lebih bertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kejelasan sasaran anggaran, yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut sehingga dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dikehendaki dengan adanya sasaran anggaran yang

jelas maka mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan dari publik. Adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada publik. Di pihak penyelenggaraan, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintahan dalam pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi yang wajib secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang diperolehnya. Tuntutan akuntabilitas atas lembaga publik baik pusat maupun daerah menyebabkan seluruh instansi pemerintah wajib menyusun perencanaan strategis. Badan pengelola keuangan dan aset daerah kota kupang sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepada bupati kabupaten kota kupang. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan kewajiban badan pengelolaan dan aset daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /ke gagalannya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan bupati dalam rangka mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja (PK). Disamping itu penyusunan LAKIP juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi badan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan mendatang.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Angreini (2014) yaitu : kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas pendapatan daerah dan badan milik daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Aprilianti, Mulyaning Wulan, Hwewin Kurniawan (2020) meneliti tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan system pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikecamatan wilayah Jakarta selatan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan pengendalian internal dan system pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara simultan kejelasan sasaran anggaran pengendalian internal dan system pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka judul penelitian ini adalah Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Badan Barang Milik Daerah Kota Kupang

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini uraian latar adalah: Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Badan Barang Milik Daerah

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka yang menjadi penelitiannya adalah Apakah kejelasan sasaran anggran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah pada Dinas BPKAD Kota Kupang ?

1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, diharapkan dapan memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, adapapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai bahan dan penambahan penambangan wawasan pengetahuan ekonomi, khususnya pemahaman mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja dan juga menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Peneliti ini mampu menambah dan mengembangkan wawasan informasi serta pengetahuan sektor publik.

b. Bagi Dinas BPKAD Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah pusat atau daerah agar dapat memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

c. Bagi Pembaca

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sebagai pemanding untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul ini.